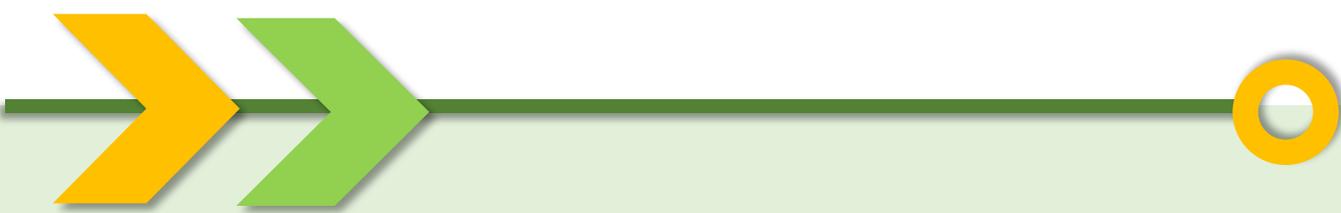


PROFESIONAI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN



PANCA



UUD



BHINEKA



NK



2018



PENDIDIKAN

KEMENTERIAN

Capaian

KEGIATAN

1. Menguraikan konsep dasar tentang hakekat, tujuan dan ruang lingkup PPKn untuk MI/SD
2. Menelaah desain pembelajaran PPKn untuk MI/SD dengan pendekatan tematik integratif dalam konteks pendidikan abad 21



 Sub-

KEGIATAN

1. Menelaah hakekat dan tujuan PPKn untuk MI/SD
2. Mengidentifikasi perkembangan sejarah PKn di Indonesia
3. Memahami paradigma baru PKn
4. Menilai konsep PKn sebagai disiplin ilmu
5. Menguraikan ruang lingkup kajian PPKn pada kurikulum MI SD
6. Merancang Materi PPKn dalam konteks pendidikan abad 21
7. Mengidentifikasi metode, model dan media untuk pembelajaran PPKn di MI/SD
8. Menelaah penilaian hasil belajar PPKn



► Pokok

KEGIATAN

1. Hakekat dan tujuan PPKn untuk MI/SD
2. Perkembangan sejarah pkn di Indonesia
3. Paradigma baru PKN
4. Konsep PKN sebagai disiplin ilmu
5. Ruang lingkup kajian PPKn pada kurikulum MI SD
6. Pengembangan Materi PPKn dalam konteks pendidikan abad 21
7. Metode, model dan media untuk pembelajaran PPKn di MI/SD
8. Penilaian hasil belajar PPKn



 *uraian***KEGIATAN****1. Konsep Dasar PPKn untuk MI/SD****1.1 Definisi, Hakekat, dan Tujuan PPKn**

- Definisi PPKn menurut para ahli:
 - a. Permendikbud. No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
 - b. Kerr
Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut (Kerr, 1999:2).
 - c. J.J. Cogan
Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. (Cogan, 1999:4).

- Hakekat PPKn

Berbagai definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa hakekat dari Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencangkup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan secara khusus peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan pembelajaran, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

- Tujuan PPKn

Tujuan dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan yang berpusat pada guru dan siswa untuk mengajar dan belajar secara sistematis dan menyeluruh menjadi serangkaian konsep demokrasi, meliputi didefinisikan, dipraktikkan, dan dievaluasi (Patrick dan Vontz 2001: 41). Sehingga dapat dikatakan dasar dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang efektif yaitu warga negara yang bersifat cakap dan memiliki kepedulian (Mukhamad Murdiono, 2012: 47). Sedangkan, tujuan PPKn pada KTSP (2006) yang dijelaskan dalam Permendikbud No. 22 tahun 2006:

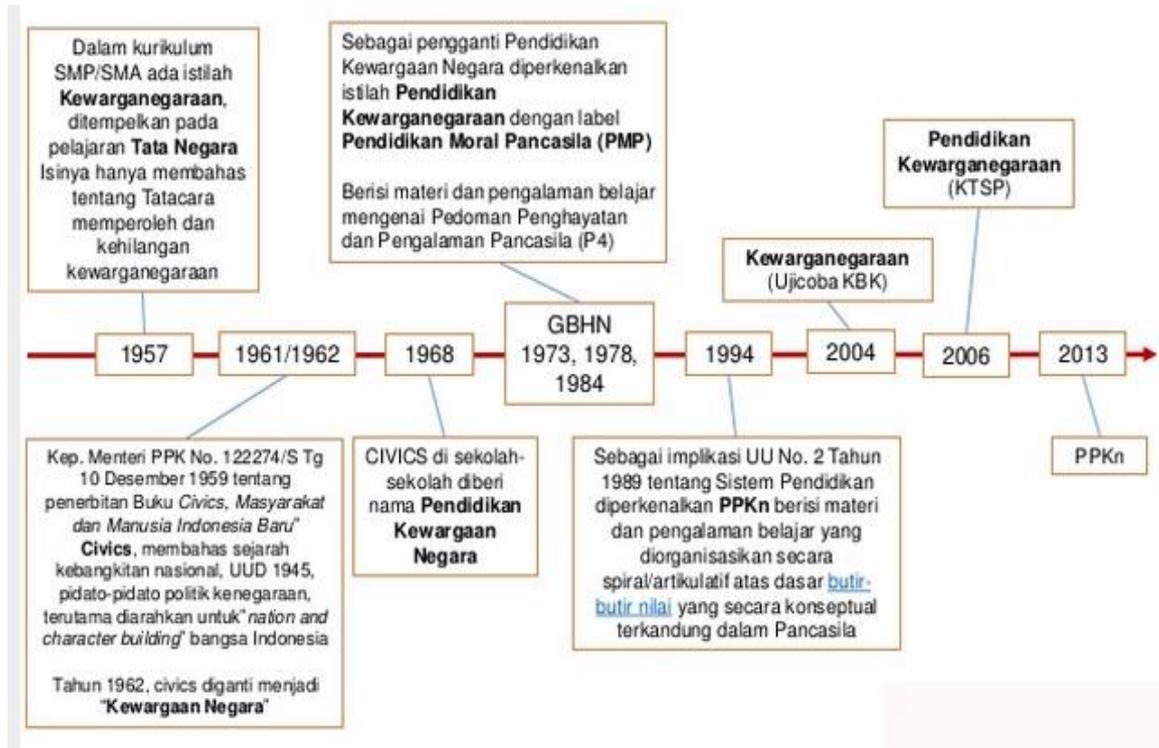
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Permendikbud No. 22 tahun 2006).

1.2 Perkembangan Sejarah PPKn di Indonesia



Mata pelajaran PKn di Indonesia dalam perkembangan sejarahnya mengalami perjalanan panjang dan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Mulai dari awal kemerdekaan perkembangan mata pelajaran PKn dalam kurikulum nasional sering berganti nomenklatur (penamaan) serta kajian materi didalamnya. Hal ini memang tidak terlepas PKn kecenderungan sebagai alat penguasa dalam mengukuhkan kekuasaan. Pada era reformasi terjadi perubahan dalam Pendidikan kewarganegaraan, dan tidak lagi menjadi alat penguasa. Berikut rangkuman perjalanan perkembangan sejarah PKn di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Peta perkembangan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Sumber : Penulis.

Sementara itu, Fokus kurikulum PKn pada jenjang SD di Indonesia dari tahun 1947-2004 dapat di lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Fokus Kurikulum PKn pada jenjang SD Indonesia
1947 – 2013

Kurikulum	Nomenklatur/ Penamaan PKn	Fokus
Rencana Pelajaran 1947	Didikan Budi Pekerti	Warga negara sejati dan pendidikan nilai dan moral
Rencana pendidikan 1962	Pendidikan Kemasyarakatan	Patriot Pancasila dan Revolusi 1945
Kurikulum 1968	Pendidikan Kewarga Negara	Pancasilais
Kurikulum 1978	Pendidikan Modal Pancasila (PMP)	Manusia pembangunan yang berPancasila
Kurikulum 1984	Pendidikan Modal Pancasila (PMP)	Manusia pembangunan yang berPancasila
Kurikulum 1994	PPKn	Manusia pembangunan yang berPancasila
Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004	PKn	Demokrasi
KTSP 2006	PKn	1. Persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Norma, hukum, dan peraturan; 3. Hak asasi manusia; 4. Kebutuhan warga negara;

Kurikulum	Nomenklatur/ Penamaan PKn	Fokus
		5. Konstitusi negara; 6. Kekuasaan dan politik; 7. Pancasila; 8. Globalisasi
Kurikulum 2013	PPKn	4 pilar kebangsaan (UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI)

Sumber : Kalidjernih, (2007: 3) dan Sunarso, (2010).

1.3. Paradigma Baru PPKn di Indonesia

Pada abad 21 pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Ranah dan cangkupan materi bergeser tidak hanya pada konsepsi moral, nilai dan karakter namun mengarah pada bagaimana konsepsi membentuk warga negara menjadi warga negara yang memiliki karakter yang baik dan memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan sebagai seorang warga negara.

Paradigma baru PPKn adalah kerangka pikir yang dibangun sebagai landasan dalam mengembangkan dan memberi bentuk konseptual baru PKn. Paradigma berarti juga suatu model atau rancang-bangun pikiran yang digunakan dalam Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Maka dibutuhkan tujuan utama dari Kurikulum kewarganegaraan terdiri dari kompetensi dan kualitas dari warga yang kita butuhkan dalam masyarakat demokratis. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap harus ditawarkan terpadu dengan pelajaran lain yang relevan. Kurikulum

kewarganegaraan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai baik dalam dan keluar sekolah. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah harus komprehensif dan terpadu dalam hubungan dengan komunitas, sekolah dan masyarakat (Doganay, 2012: 37).

Berdasarkan pemeparan tersebut, misi PKn sekarang di Indonesia dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis berfungsi mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis. Ketiga pokok karakter tersebut yakni; (1) pengetahuan warga negara (2) keterampilan warga negara, (3) disposisi warga negara. Selanjutnya, Patrick & Vontz (2001: 41) menjabarkan kompetensi pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintah dalam demokrasi (pengetahuan warga negara)
 - a) Konsep/prinsip mengenai substansi demokrasi
 - b) Isu tentang arti dan inti pelaksanaan ide-ide
 - c) Konstitusi dan lembaga-lembaga perwakilan pemerintahan demokrasi
 - d) Organisasi dan fungsi dari lembaga-lembaga demokratis
 - e) Praktik-praktik demokrasi kewarganegaraan dan peran warga
 - f) Konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan ekonomi
 - g) Sejarah di negara-negara tertentu dan di seluruh dunia
- 2) Keterampilan intelektual kewarganegaraan dalam demokrasi (keterampilan kognitif warga negara)
 - a) Mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena (kejadian dan persoalan) politik, kehidupan warga negara



- b) Menganalisis dan menjelaskan fenomena (kejadian dan persoalan) kehidupan politik/bernegara
 - c) Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada isu-isu dan acara-acara publik
 - d) Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan politik/bernegara
 - e) Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/sipil
- 3) Keterampilan partisipatori warga negara dalam demokrasi (keterampilan partisipatif warga negara)
- a) Interaksi warga negara dengan warga negara lain untuk kepentingan pribadi dan umum
 - b) Pemantauan acara-acara dan masalah publik
 - c) Membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik
 - d) Melaksanakan keputusan umum, sebagai kebijakan publik
 - e) Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik/sipil
- 4) Watak warga negara dalam demokrasi (watak warga negara)
- a) Mempromosikan kesejahteraan umum
 - b) Menegaskan kesamaan tentang kemanusiaan dan martabat setiap orang
 - c) Menghormati, melindungi, dan menggunakan hak-hak yang dimiliki sama dengan setiap orang
 - d) Berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik/sipil masyarakat
 - e) Menghormati, melindungi, dan berlatih pemerintah dengan persetujuan dari orang-orang
 - f) Mendukung dan berlatih kebajikan sipil (Patrick & Vontz, 2001: 41)



Sementara itu, Doganay (2012: 31) menjabarkan berkaitan komponen-komponen dalam kompetensi kewarganegaraan seperti pada gambar berikut.

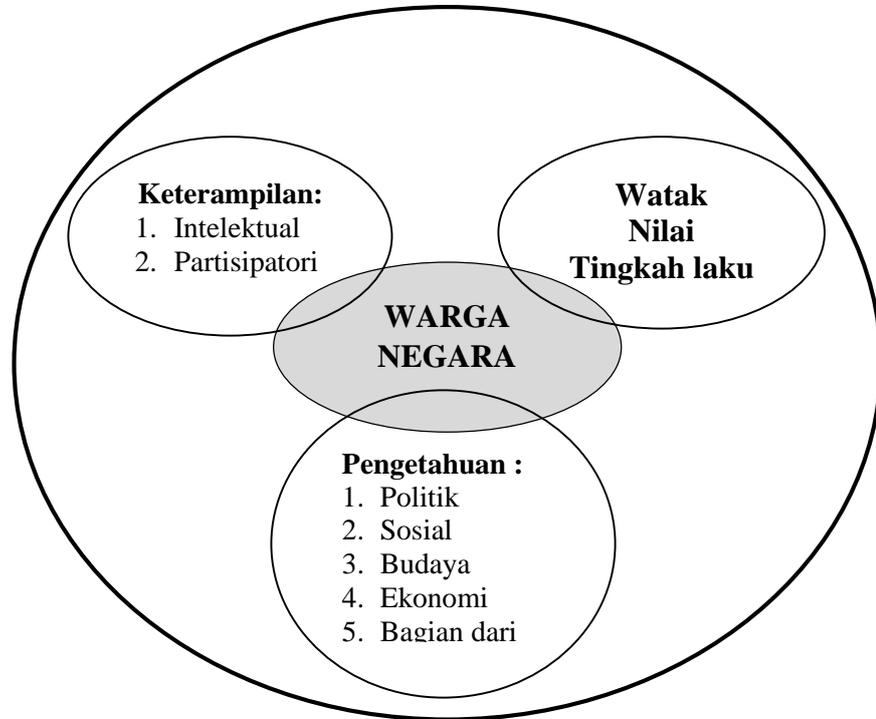


Diagram 1. Kategori Utama dari Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis. Sumber: Doganay (2012: 31)

1.4 PKn sebagai Disiplin Ilmu

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan disiplin ilmu yang membutuhkan kajian serta keseriusan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Secara instrumental dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 dinyatakan bahwa: "...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak warganegara.

Pemaparan UU tersebut mempertegas bahwa PKn sesuai dengan kode etik keilmuan. Kode tersebut telah mengandung pedoman, acuan, standar (nilai, norma, kaidah keilmuan) sikap dan perilaku yang dipandang layak, pantas, jujur, dan benar serta diakui, dijunjung tinggi, disepakati oleh anggota keilmuan dalam setiap upaya, karya, dan ikhtiar keilmuan.

1.5 Ruang Lingkup Kajian PPKn dalam Kurikulum MI/SD

Dasar dari ruang lingkup kajian PPKn di Indonesia, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, ruang lingkup materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk MI/SD mulai dari kelas I-VI sebagai berikut:

- Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara.
- Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat.
- Semangat kebersamaan dalam keberagaman.
- Persatuan dan kesatuan bangsa
- Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia.
- Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara.
- Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural.
- Moralitas sosial dan politik warga negara/ pejabat negara, dan tokoh masyarakat
- Nilai dan moral Pancasila.
- Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan.
- Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa.
- Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari

Sementara itu, Udin.S.Winataputra, (2014: 6) meramu ruang lingkup dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD/MI pada kurikulum 2013, meliputi:



- a. Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional.
- b. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

Berkaca pada ruang lingkup di atas, paradigma Kurikulum 2013 yang saat ini memasuki tahap implementasi meluas, keempat ruang lingkup materi tersebut diorganisasikan secara psikologis dan sosial kultural dengan menggunakan pendekatan logika substantif dan spiral lingkungan semakin meluas mulai dari kelas I SD sampai dengan kelas VI SD. Dengan menggunakan konsepsi adanya integrator kompetensi yang menjadi jembatan atau tangga mendukung/ *scaffolder* dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni Kompetensi Inti (KI), dikembangkan Kompetensi Dasar (KD) yang tidak lain merupakan kompetensi bermuatan substansi mata pelajaran/mata kuliah.

Pengembangan ruang lingkup kajian PPKn di Indonesia telah menyesuaikan dengan karakteristik warganegara abad ke-21. Cogan and Derricott, (1998:115) memaparkan bahwa karakteristik yang harus dimiliki warga negara abad 21 adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.



- b. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
- c. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
- d. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
- e. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb).
- f. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
- g. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
- h. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

2. Desain Pembelajaran PPKn untuk MI/SD dengan Pendekatan Tematik Integratif dalam Konteks Pendidikan Abad 21

2.1 Merancang Materi PPKn dalam Konteks Pendidikan Abad 21

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi, pada prinsipnya indikator adalah penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda kemampuan yang harus dikuasai peserta didik secara individu atau target individu peserta didik. Dengan demikian, apabila peserta didik secara individu belum mencapai kemampuan seperti yang dirumuskan dalam indikator maka ia harus memperbaiki kemampuannya melalui pembelajaran remedial.



Materi yang dikembangkan pada pembelajaran PPKn kurikulum 2013 tidak hanya memfokuskan pada Kompetensi dan indikator kompetensi yang akan dicapai. Dalam hal ini pengembangan materi dalam KD juga harus memperhatikan tujuan dari PPKn sebagai membentuk warganegara yang demokratis. Materi yang disajikan mampu membawa pada nilai-nilai pembentukan karakter, keterlibatan siswa serta membawa fakta-fakta yang ada dimasyarakat. Menggambarkan contoh-contoh dan realita persoalan bangsa dan negara, sehingga menimbulkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran PPKn di kelas.

Menurut Etin Solihatin (2012: 164) Materi yang sesuai dengan pembelajaran PPKn untuk MI/SD dibutuhkan materi yang menuntut pemahaman yang tinggi terhadap nilai konsep atau masalah actual dimasyarakat serta keterampilan menerapkan pemahaman tersebut dalam bentuk karya nyata. Lebih lanjut, Etin Solihatin (2012: 169) mengungkapkan salah satu contoh yang bisa digunakan seperti cerita rakyat atau donegeng dari berbagai daerah, seperti maling kundang, sikancil dan lain-lain. Selain itu dapat berupa video, berita dari koran atau tabloid dan sebagainya terkait informasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan publik.

2.2 Metode Pembelajaran PPKn untuk MI/SD

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dari kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pada bagian ini dituliskan semua metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dilakukan melalui penerapan berbagai pembelajaran



inovatif, kreatif, dan kontekstual sebagai wahana pembentukan karakter peserta didik secara utuh. Udin.S.Winataputra (2014: 7) menyebutkan dalam pembelajaran PPKn di kelas metode yang harus ditekankan adalah suasana pengalaman belajar diseleksi dan diorganisasikan dengan menggunakan antara lain: (1) pendidikan nilai dan moral; (2) pendekatan lingkungan meluas; (3) pembelajaran aktif; (4) pemecahan masalah; (5) pendekatan kontekstual; (6) pembelajaran terpadu; (7) pembelajaran kelompok (8) praktik belajar kewarganegaraan; (9) pemberian keteladanan; dan (10) penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang berkarakter sesuai dengan nilai dan moral Pancasila.

Metode pembelajaran yang mampu mengembangkan pembelajaran PPKn dalam membentuk warganegara yang cerdas dan baik antara lain:

- a. VCT (*Value Clarification Technique*)
- b. Simulasi
- c. Bermain peran
- d. Diskusi
- e. Debat isu-isu publik
- f. Jigsaw
- g. *Reading Guide* (Membaca Buku Ajar)
- h. *Information Search* (Mencari Informasi)
- i. Studi kasus (Etin Solihatini, 2012: 81).

2.3 Model Pembelajaran PPKn untuk MI/SD

Pembelajaran PPKn perlu dipahami sebagai hubungan konseptual dan fungsional strategi serta metode pembelajaran dengan pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan dimaknai sebagai cara menyikapi/melihat (*a way of viewing*). Strategi dimaknai sebagai cara mencapai tujuan dengan sukses (*a way of winning the game atau a way of achieving of objectif*). Metode adalah cara menangani sesuatu (*a way of dealing*). Sedangkan teknik dimaknai sebagai cara memperlakukan sesuatu



(*a way creating something*). Dilain pihak model adalah kerangka yang berisikan langkah-langkah/urut-urutan kegiatan/sintakmatik yang secara operasional perlu dilakukan oleh guru dan siswa.

Citizenship Foundation (2006: 103) menyebutkan beberapa model strategi pengajaran dan pembelajaran PKn untuk membentuk warga negara yang memiliki partisipasi aktif. Model itu ialah (1) *Learning climate*, (2) *Topical and controversial issues*, (3) *Active learning*, (4) *Group discussions and debates*, (5) *Developing discussion skills*, (6) *Project work*, dan (7) *Written activities*. Ketujuh model itu, melihat kategori Butts (1988), tergolong dalam kelompok pembelajaran yang bersifat partisipasi kewarganegaraan.

Selain itu, Birzea (2000: 26) menjabarkan model-model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain; *Experiential learning*, *Collaborative learning*, *Intercultural learning*, *Action learning*, *Contextual learning*. Sementara dalam Kurikulum 2013, pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dalam hal ini, ada beberapa model pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan elemen-elemen pendekatan saintifik. Model yang sesuai dengan pendekatan saintifik antara lain; model pembelajaran inkuiri, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek (Ridwan Abdullah Sani, 2014: 76 dan Yunus Abidin, 2014: 123).

Sementara itu, Civic Center Education (CCE) merekomendasikan model pembelajaran *Project citizen* sebagai model pembelajaran berbasis isu-isu yang terjadi di masyarakat di telaah dan di carikan solusi, kemudian membawa solusi untuk disampaikan kepada instansi terkait. Sehingga bisa dikatakan model PC mengajak siswa belajar bagaimana menjadi warganegara yang aktif dan berpartisipasi terhadap masalah publik.

2.4 Media pembelajaran PPKn



Media belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan media, alat, bahan dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran dan didasarkan pada kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi

Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi sehingga media yang digunakan disebut media pembelajaran. Banyak ahli IT yang memberikan Batasan tentang media pembelajaran. AECT misalnya, mengartikan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Media pembelajaran sifatnya lebih khusus, maksudnya media Pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan secara khusus (Etin Solihatin, 2012: 184-185).

Manfaat media pembelajaran PKN secara umum adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga dalam kegiatan pembelajaran lebih aktif dan efisien. Salah satu contohnya seperti video, berita koran/internet, LCD, *Virtual reality* (VR), AR dan lain-lain.

2.5 Evaluasi hasil belajar PPKn

Evaluasi dalam pembelajaran PPKn dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh dan utuh. Berdasarkan Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan pada pasal 1 ayat (1) Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan Penilaian adalah



proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Lebih lanjut, pada Pasal 3 ayat (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: sikap; pengetahuan; dan keterampilan. Pada Pembelajaran PKn terdapat pula tiga kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki seorang warga negara, yaitu; pengetahuan warga negara, keterampilan warga negara, dan sikap warga negara. Dalam hal ini, Torney (2015: 36) menjelaskan untuk mengukur aspek pengetahuan warga negara dalam bentuk tes tulis bentuk pilihan ganda atau uraian. dimana dalam pembuatan soal guru dapat memasukkan soal dalam bentuk narasi cerita untuk stimulus pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan analitik. Selain itu bentuk soal untuk pengetahuan bisa dalam bentuk video berkaitan dengan studi kasus yang di angkat.

Lebih lanjut, Torney (2015: 36) menjelaskan untuk mengukur keterampilan warga neagra dapat mengukur dengan menggunakan skla likert dengan bentuk sosal penilaian proyek atau penugasan. Terakhir untuk mengukur kompetensi sikap warga negara dapat juga menggunakan skala likert dengan bentuk pertanyaan penilaian sendiri dan penilaian teman sejawat.





Daftar Pustaka

KEGIATAN

- Branson, Margaret S. (1998). *The role of civic education: a forthcoming education policy task force position paper from the communitarian Network*. Washington, DC: Center for Civic Education.
- Cogan, J.J. (1999). *Developing the civic society: the role of civic education*. Bandung: CISED.
- Cogan, John J. and Ray Derricott. (1998). *Citizenship education for the 21st century: setting the context*. London: Kogan Page.
- Doğanay, Ahmet. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. dalam Print, Murray & Lange, Dirk (eds.). (2012). *Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens*. Rotterdam: Sense Publishers. pp. 19-40.
- Kalidjernih, Freddy K. (2007). *Postcolonial citizenship education : a critical analysis of production and reproduction of the indonesia civic ideal*; Cakrawala Baru Kewarganegaraan.
- Kerr, David. (1999). *Citizenship education: an international comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Murdiono, Mukhamad. (2012). *Strategi pembelajaran kewarganegaraan : berbasis portofolio*. Yogyakarta: Ombak.
- Patrick, John J. and Thomas S. Vontz. (2001). Components of education for democratic citizenship in the preparation of social studies teacher. dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.). (2001).



Principles and practices of democracy in the education of social studies teachers. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas, pp. 39-64.

Purta, Judith Torney, et.al. (2015). *Assessing civic competency and engagement in higher education: research background, frameworks, and directions for next-generation assessment.* ETS Research Report Series ISSN 2330-8516. September 2015.

Solihatin, Etin. (2012). *Strategi pembelajaran PPKN.* Jakarta: Bumi Aksara.

Udin S. Winataputra. (2014). *Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (gagasan, instrumentasi & praktis).* Bandung: Widya Aksara Press.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang standar Isi

